

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan misi pemerintah pusat yaitu pemerintah yang bersih. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu kiranya pemerintah daerah melakukan upaya nyata dalam hal ini mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dalam hal ini pengelola keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005). Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus disusun berdasarkan standar

akuntansi pemerintahan (SAP) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 56 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 yang menyatakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Standar akuntansi pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara dan Pembendaharaan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual, sesuai dengan amanat Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun, sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Pada tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah tuntas disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas

menuju akrual (*cash toward accrual*) akan dimulai paling lambat pada tahun 2015.

Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru tersebut yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintah (SAP) tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (Ardiansyah, 2013). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak.

Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, salah satunya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan sumber daya manusia (SDM) dibidang akuntansi pemerintahan.

Termasuk didalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

Dengan ditetapkannya perubahan pada PP No. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010 maka sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan perubahan SAP tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian kondisi sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah khususnya yang melaksanakan fungsi akuntansi dan fungsi pelaporan yang nantinya menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Selain sumber daya manusia (SDM), komitmen organisasi dan komunikasi juga memiliki peran yang penting dalam mendukung kesiapan penerapan SAP tersebut. Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa Kementrian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Suranto (2005) dalam Warisno (2009) menyatakan bahwa dengan komunikasi yang baik maka seluruh komponen dalam SKPD dapat secara sistematis bekerja dalam satu arah yang sama yaitu untuk meningkatkan produktifitas instansi.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perangkat pendukung. Perangkat pendukung berupa teknologi informasi yang digunakan antara lain *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Sulani (2010) berpendapat bahwa ketersediaan perangkat pendukung yang akan

membantu SKPD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP.

Empat pemerintah daerah yang ada di Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang sampai saat ini masih menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (PP No. 24 Tahun 2005) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh empat pemerintah daerah tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesiapan pemerintah daerah yang ada di Madura dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010), karena untuk tahun 2015 kedepan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah tidak lagi menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (PP No. 24 Tahun 2005) melainkan harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010) dilakukan oleh Ardiansyah (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dan komunikasi mempunyai pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual sedangkan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh. Kusuma (2013) melakukan

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah masih sangat rendah. Secara khusus tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan.

Penelitian Novalina (2012) tentang kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang belum siap dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual karena masih perlu pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM), kebijakan, dan infrastruktur untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan tentang kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu penelitian Ardiansyah (2013), Kusuma (2013) dan Novalina (2012). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba meneliti ulang dengan menambahkan variabel terkait kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dan menambah aspek-aspek yang menjadi keterbatasan peneliti sebelumnya serta dilakukan pada kabupaten yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan pada 4 (empat) kabupaten yang ada di Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti menggunakan faktor sumber daya manusia (SDM), komitmen organisasi, komunikasi, dan perangkat pendukung yang diduga memiliki pengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah ?
3. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah ?
4. Apakah perangkat pendukung berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah ?
5. Apakah sumber daya manusia, komitmen organisasi, komunikasi, dan perangkat pendukung secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.
3. Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.
4. Mengetahui pengaruh perangkat pendukung terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

5. Mengetahui pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, komunikasi, dan perangkat pendukung secara simultan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat terkait dengan kesiapan dalam menerapkan SAP berbasis akrual agar bisa lebih mempersiapkan secara dini.
2. Bagi penulis, dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual serta penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.